

.....

**PENGEMBANGAN RANTAI NILAI KOMODITAS UNGGUL SEKTOR PERTANIAN
PADI DI KABUPATEN PONOROGO DAN KABUPATEN MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Abid Rohmanu^{*1}, Murdianto², Cokro wibowo Sumarsono³, Jamianto⁴, Bagio Prasasti⁵,
Suad Fikriawan⁶**

¹ Pascasarjana IAIN Ponorogo, ²INSURI Ponorogo, ³UNIRA Malang, ⁴Lembaga Kajian Pengembangan
Otonomi Daerah Jawa Timur, ⁵BUMD Pemerintah Kota Batu, ⁶INSURI Ponorogo
e-mail: ^{*1}abid76@iainponorogo.ac.id, ²murdianto29@gmail.com, ³cokrowobowo@gmail.com,
⁴jamianto81@admin.sma.belajar.id, ⁵bagyoprasasti@gmail.com

Abstrak

Isu kesejahteraan petani, belum banyak literatur yang membincang problem kesejahteraan petani dengan pendekatan kebijakan berdasar alur rantai nilai komoditas ini. Literatur tentang komoditas padi secara umum terpilah menjadi: pertama, literatur yang membahas tentang motivasi dan imbal hasil petani. Penelitian ini akan melihat mata rantai nilai pertanian padi mulai dari kegiatan tanam (on farm) hingga distribusi (off farm). Dengan analisis rantai nilai diharapkan bisa diidentifikasi secara sistemik berbagai potensi dan kendala terkait imbal hasil petani. Setelah teridentifikasi, model kebijakan rantai nilai yang berbasis pada kemaslahatan masyarakat petani akan diirumuskan.

Berdasar hal tersebut, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana rantai nilai komoditas padi di Madiun dan Ponorogo; (b) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap imbal hasil pada rantai nilai komoditas padi? (c): bagaimana model inovasi rantai nilai sektor pertanian padi dikembangkan? Penelitian ini dilokuskan di Kabupaten Madiun dan Ponorogo. Dua kabupaten ini berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan padi di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, Kecamatan Balerejo mewakili Kabupaten Madiun, sementara Kecamatan Babadan mewakili kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian ini adalah Kegiatan on farm pertanian meliputi: persemaian bibit, penanaman, pengairan, pemupukan, dan pemanenan. di Kecamatan Babadan, persemaian bibit dilakukan dengan dua model, yakni model konvensional dan model gulungan. Model pertama konvensional dilakukan dengan menyebar benih padi dipermukaan tanah sawah yang di-gadang. Di antara kelemahan model ini adalah pengawasan ekstra terhadap benih dari serangan hama. Model kedua adalah gulungan. Model persemaian ini semakin banyak diterapkan karena dinilai efisien oleh petani. Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses on farm maupun off farm meliputi: permodalan, pengelolaan lahan dan pengairan, penyediaan bibit, pupuk, dan insektisida, serta distribusi dan penjualan. Pada aspek permodalan sebagian petani masih bertumpu pada sistem utang (rente) kepada pihak ketiga (bakul/pengusaha penggilingan padi). pemenuhan modal pengelolaan padi dengan sistem ini dinilai oleh petani bersifat sederhana dan sesuai kebutuhan dibandingkan dengan pengajuan modal kepada pihak perbankan.

Kata Kunci: Rantai Nilai, Komoditas Unggul

PENDAHULUAN

Data BPS menunjukkan sebagian besar masyarakat Kabupaten Madiun dan Ponorogo menggantungkan hidup dari sektor pertanian (42,17 dan 55,09 dari angkatan kerja Tahun 2018). Pada tahun 2018, sektor tanaman padi di Kabupaten Ponorogo memiliki luas panen 78.962 Ha dengan jumlah produksi 4.550.580 kuintal. Di Kabupaten Madiun tanaman padi menjadi yang paling dominan dengan luas panen 85.667 Ha dan produksi total 5.434.630,8 kwintal. Kontradiktif dengan data di atas, imbal hasil Petani dari usaha taninya relatif belum sesuai dengan harapan. Kasus di Ponorogo misalnya, berdasar salah satu riset, Petani padi hanya mendapatkan 51% pendapat bersih dari usaha taninya.

Direktur Pasar Komoditi Nasional, yaitu Parwadi, menegaskan problem klise petani, yakni masalah kesejahteraan petani. Petani selalu dihadapkan pada ketidakpastian: tren konsumsi yang terus bergeser, ancaman gagal panen, anjloknya harga jual dan ketidakpastian lainnya (ekonomi.bisnis.com, 2019).

Begitu pentingnya isu kesejahteraan petani, bahkan belum banyak literatur yang membincang problem kesejahteraan petani dengan pendekatan kebijakan berdasar alur rantai nilai komoditas ini. Literatur tentang komoditas padi secara umum terpilah menjadi: pertama, literatur yang membahas tentang motivasi dan imbal hasil petani (Nisa, 2015, Nirmala, Hanani, & Muhaimin, 2016) (Wahyunindyawati, 2009).

Kedua, literatur tentang pendekatan agribisnis dalam pengembangan komoditas padi (Dewi & Santoso, 2014, Pradiana, Wida, 2007) (Jurnal Manajemen & Agribisnis, 2014). Ketiga literatur tentang penggunaan teknologi pertanian (Holik & Bachtiar, 2019, Rianto, Putra, & Harpawi, 2017) dan pemberantasan hama (Wiyono, Widodo, & Triwidodo, 2015, Wurjandari et al., 2014)

Sejalan dengan hal di atas, penelitian ini akan melihat mata rantai nilai pertanian padi mulai dari kegiatan tanam (*on farm*) hingga distribusi (*off farm*). Dengan analisis rantai nilai diharapkan bisa diidentifikasi secara sistemik berbagai potensi dan kendala terkait imbal hasil petani. Setelah teridentifikasi, model kebijakan rantai nilai yang berbasis pada kemaslahatan masyarakat petani akan diumumkan. Berdasar hal tersebut, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Bagaimana rantai nilai komoditas padi di Madiun dan Ponorogo; (b) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap imbal hasil rantai nilai komoditas padi? (c): bagaimana model inovasi rantai nilai sektor pertanian padi dikembangkan?

Tulisan ini didasarkan pada argumen: a) imbal hasil petani ditentukan oleh rantai nilai pertanian padi yang meliputi segenap proses tanam hingga distribusi hasil panen (padi). b) Rantai nilai pertanian padi sebagai penentu imbal hasil petani dipengaruhi oleh relasi kuasa dan belum teraktualisasinya potensi variabel-variabel pertanian. c) rantai nilai pertanian padi bisa dimodelkan dengan mengacu kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan petani.

Inovasi daerah adalah kompleksitas proses dalam sebuah sistem untuk menumbuhkan-kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah (pusat) dan pemerintahan daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha (perusahaan dan UMKM), dan masyarakat di wilayah daerah. Sistem inovasi menekankan networking/jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Pada dasarnya,

merupakan agenda nasional sesuai dalam UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 dan UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Agenda nasional tentang sistem inovasi menekankan pada empat pilar. Pertama, inovasi adalah proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa perubahan teknologi tidak banyak dipertimbangkan sebagai pengembangan material, tetapi lebih sebagai suatu rekombinasi dari pengetahuan (yang seringkali sudah ada) atau penciptaan kombinasi-kombinasi baru yang menuntut keterlibatan banyak pihak. Kedua, penekanan pada peranan lembaga. Lembaga dapat dianggap sebagai ketentuan, regulasi, dan rutinitas yang membentuk ruang kemungkinan bagi aktor-aktor. Ketiga, inovasi menekankan hubungan antara aktor dan lembaga atau adanya gagasan tentang suatu sistem. Keempat, inovasi menekankan pentingnya interaksi yang berkelanjutan di antara banyak proses dimana semua proses ini berjalan paralel dan memperkuat satu sama lain melalui mekanisme umpan balik positif.

METODE

Penelitian Penelitian ini dilokuskan di Kabu Penelitian ini dilokuskan di Kabupaten Madiun dan Ponorogo. Dua kabupaten ini berkontribusi signifikan terhadap ketersediaan padi di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, Kecamatan Balerejo mewakili Kabutan Madiun, sementara Kecamatan Babadan mewakili kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokus tersebut didasarkan pada nilai surplus padi di dua Kecamatan.

Jenis penelitian adalah kualitatif yang menekankan pada makna rantai nilai komoditas padi. Beberapa data kuantitatif dikualifikasikan untuk kepentingan tujuan penelitian. Data rantai nilai komoditas padi di dua Kecamatan diperoleh dengan teknik wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi.

FGD di dua Kecamatan menjadi teknik utama karena analisis rantai nilai pertanian padi melibatkan banyak pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan utama dalam penelitian ini adalah: petani, Poktan., Gapoktan, BumDes, PPI pertanian, Bulog, dan Dinas Pertanian di Kabupaten Madiun dan Ponorogo.

Teknik analisis data (restatement, description, interpretation): Analisis data dilakukan mengikuti metode Miles and Huberman, yakni pengumpulan dan reduksi data, display, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dari hulu hingga hilir penelitian dengan mengacu pada konsep rantai nilai dan perspektif siyasah syar'iyah dalam penyusunan model rantai nilai komoditas padi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rantai Nilai

a. Review literatur

Rantai nilai (value chain) mempunyai makna sempit dan luas. Makna sempit rantai nilai mengacu pada serangkaian kegiatan menghadirkan suatu produk atau jasa yang dimulai dari tahapan konseptualisasi, produksi, distribusi bahkan pasca produksi. Setiap tahapan diarahkan untuk menambah nilai produk. Layanan purna jual misalnya adalah bagian dari rantai nilai untuk menambah nilai produk tertentu sehingga bahkan konsumen bersedia membayar lebih mahal untuk produk tersebut. Sementara itu, makna luas rantai nilai tidak melihat kegiatan yang dilakukan oleh usaha tertentu, tetapi melihat hubungan yang resiprokal antar tahapan dalam alur hasil/manfaat produk tertentu. Sistem produksi bahan baku dalam pengertian luas ini misalnya akan terus terkait dengan tahapan kegiatan lain (pengolahan, perakitan, dan perdagangan).

Mengacu pada tulisan Michael E. Porter, konsep rantai nilai bisa dipakai untuk melakukan analisis bagaimana sebuah kegiatan usaha menempatkan dirinya dalam konteks pasar (pemasok, pembeli dan pesaing). Dalam hal ini perusahaan akan dituntut untuk

.....
mengembangkan keunggulan kompetitif dan dengan strategi pengurangan biaya atau strategi diferensiasi. Dengan strategi pengurangan biaya sebuah perusahaan bisa menawarkan produk yang setara dengan produk lain dengan harga yang lebih murah.

Sementara itu, strategi diferensiasi memberikan distingsi produk dan nilai plus sehingga walaupun dengan harga yang lebih tinggi konsumen bersedia membayarnya. Lebih jauh, Kaplinsky dan Morris (dalam ACIAR, 2012) menjelaskan ada empat aspek penting analisis rantai nilai, yakni a) pemetaan para pelaku yang terlibat dalam proses produksi, b) analisis distribusi manfaat bagi para pelaku, c) peningkatan (upgrading) dalam rantai nilai, d) peran tata kelola internal (para pelaku dalam rantai nilai) dan eksternal (support kemampuan kelembagaan untuk meningkatkan nilai tambah produk).

Berdasar data, kemitraan antar pemangku kepentingan dalam mengembangkan kerajinan kulit di Ponorogo belum optimal. Relasi antar pemangku kepentingan masih bersifat parsial dan belum dilakukan secara terencana (*by design*). Kemitraan yang sudah ada pun, misalnya antara Pemerintah dan Komunitas, belum benar-benar bisa dikatakan produktif. Pendekatan yang bersifat formal terhadap komunitas bisa menjadi salah satu faktor mengapa relasi tersebut belum produktif. Pada sisi lain,

Pemerintah Daerah belum menggandeng pemangku-pemangku kepentingan lain dalam mengembangkan potensi kelembagaan industri kerajinan, Pemerintah Daerah bagaimana pun berposisi sebagai *play maker* menjembatani dan memediasi kemitraan antara pemangku kepentingan; pemerintah, perguruan tinggi, institusi keuangan/pelaku bisnis, akademik dan komunitas/pelaku usaha.

Kebijakan regulasi menyambungkan antar pemangku kepentingan menjadi urgen

dilakukan. Misalnya dalam hal ini kebijakan pemerintah dalam hal penyiapan tenaga ahli/kerja dalam bidang kriya kulit yang wujudnya bisa dalam bentuk rekomendasi pembukaan pelatihan vokasional/ program studi Kriya Kulit Sekolah Menengah Kejuruan.

Belum optimalnya kemitraan berefek pada banyak aspek, yakni suplai bahan baku, tenaga kerja, inovasi produk, permodalan, dan pemasaran. Bahan baku yang masih mentah relatif tercukupi terbukti dari adanya beberapa pengepul (besar) kulit di Ponorogo, tetapi bahan baku yang siap diproduksi (kulit samak) masih didatangkan dari beberapa daerah lain (Magetan, Semarang, Yogyakarta, bahkan yang dari luar negeri). Aspek tenaga kerja juga masih banyak dikeluhkan oleh pengrajin/pengusaha kerajinan. Umumnya pengusaha pada kerajinan melatih secara mandiri tenaga kerjanya yang tentu mengurangi efektivitas produksi. Inovasi produk masih bertumpu pada pengrajin semata, yakni belum berkolaborasi dengan mitra akademik. Sementara aspek permodalan untuk menstimulasi usaha kerajinan belum banyak dirasakan oleh para pengrajin. Last but not least, aspek pemasaran menjadi kendala maha berat bagi para pengrajin. Masing-masing pengrajin berupaya mencari lubang-lubang pemasaran sendiri-sendiri yang tidak selalu menguntungkan bagi eksistensi dan survivalitas usaha mereka. Persoalan ini diperparah dengan belum berdayanya para komunitas-komunitas pengrajin yang mereka bangun

a. Konsep Bidang Kemitraan

Berdasar isu-isu di atas, kemitraan dan kolaborasi menjadi kata kunci. Kerajinan kulit perlu diorientasikan pada daya saing dan keunggulan yang menjadi ciri khas Ponorogo. Orientasi ini meniscayakan peran pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang kondusif dengan menyatukan segenap potensi yang dimiliki para stakeholders kerajinan kulit yang dalam tulisan ini disebut

dengan *four helix of innovation* (pemerintah, akademik, pengrajin, dan institusi keuangan serta pelaku bisnis). Kemitraan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir rantai kegiatan usaha kerajinan.

Untuk kepentingan di atas, ada 4 bidang kemitraan yang bisa dilakukan, yakni kemitraan dalam Bidang Penyiapan Bahan Baku, Kemitraan dalam Bidang Inovasi dan Penyiapan Tenaga Kerja Terlatih, Kemitraan dalam Bidang Permodalan, dan Kemitraan dalam Bidang Pemasaran.

Kemitraan dalam Bidang Penyiapan Bahan Baku

Bahan baku kulit adalah rantai nilai penting dalam industri kerajinan kulit. Tersedianya bahan baku yang berkualitas, kemudahan akses, dan harga yang kompetitif merupakan angin segar bagi keberlangsungan dan perkembangan industri. Untuk itu idealnya Pemerintah Daerah lewat dinas-dinas terkait mempertimbangkan dan menginisiasi industri penyamakan di Ponorogo. Adanya industri penyamakan menjamin ketersediaan bahan baku dengan harga yang lebih murah dibandingkan harus mendatangkan dari luar wilayah.

Bagaimana jika terjadi surplus bahan baku karena ada industri penyamakan? Bahan baku bisa dipasarkan tidak saja di Ponorogo untuk mendukung industri ini, tetapi juga bisa dipasarkan ke wilayah-wilayah lain yang tentu mempunyai nilai ekonominya tersendiri. Kasus Magetan misalnya, bahan baku dipasarkan ke luar wilayah Magetan justru lebih banyak daripada yang terserap di industri lokal.

Kemitraan dalam Bidang Inovasi dan Penyiapan Tenaga Kerja Terlatih

Inovasi menjadi kunci pengembangan kerajinan kulit di Ponorogo. Inovasi ini terutama berkaitan dengan produk dan bahan baku produk. Inovasi selama ini masih bertumpu pada inisiatif para pengrajin. Umumnya para pengrajin berdasar pengamatan Dinas Perdakum kurang berani melakukan

inovasi produk, Alasan utamanya takut tidak laku.

Tapi ini berbeda dengan pengalaman Bukhari, Pengrajin Tas timur terminal Seloaji. Produk Bukhari diekspor ke Jepang lewat CV Sida Budi Bali. Di Jepang biasanya ada pameran kerajinan, pengrajin diminta untuk mengirimkan sample. Jika diterima (biasanya beberapa kali revisi) pengrajin diminta untuk membuat dalam skala yang banyak. Bukhari telah memproduksi sekitar 15 model tas. antara model tersebut ada yang hanya bertahan 2 atau 3 tahun sesuai dengan permintaan pasar.

Kemitraan dalam Bidang Permodalan

Aspek permodalan mencuat sebagai problem pengembangan kerajinan di Ponorogo (FGD I, Oktober 2021). Hal ini diperparah dengan pandemi covid-19. Pengakuan dari rata-rata pengrajin penjualan mereka merosot tajam akibat konsumen yang berkurang daya belinya. Produksi kerajinan mereka juga terganggu akibat tidak lancarnya bahan baku karena penerapan PPKM. Ini sebagaimana dituturkan oleh Bukhari, Pengrajin Tas, yang telah menjalin kontrak suplai kerajinan dalam jumlah tertentu (Wawancara, R4).

Suntikan stimulus bantuan/permodalan menjadi urgen dilakukan. Pengrajin kulit adalah bagian dari usaha berskala kecil dan menengah jumlahnya dominan di Indonesia. Mereka menjadi soko guru perekonomian karenajumlahnya mencapai 99,9 persen dari 64,2 juta unit usaha. Tetapi pada praktiknya, bantuan dan stimulus ekonomi tak banyak dirasakan oleh para pengrajin di Ponorogo.

Jikalau ada bantuan, umumnya belum didistribusi secara merata. Dalam bahasa salah satu Pengrajin akses bantuan terkadang hanya bisa diakses oleh mereka yang dekat dengan Pendopo (Wawancara, R7). Pada paparan tabulasi skema bantuan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemic covid-19, terlihat belum satu pun pengrajin/pengusaha kerajinan yang mendapatkan insentif PEN.

Jumlah penerima PEN pun sangat sedikit dibanding jumlah UMKM yang bergerak dalam bidang kriya atau kriya kulit.

Menurut analisis Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, bantuan PEN masih terkesan formal dan menyulitkan bagi pelaku UMKM. Misalnya, syarat penerima bantuan PEN diharuskan mempunyai pinjama bank dan NPWP. Sementara itu umurnya pelaku UMKM hanya mempunyai nomor rekening dan sedikit yang mempunyai NPWP. Para pelaku UMKM (yang umurnya tidak berpendidikan tinggi) mempunyai tingkat literasi keuangan dan tingkat literasi digital yang rendah (Fiskal.kemenkeu.go.id.).

Kemitraan dalam Bidang Branding dan Pemasaran.

Pemasaran adalah bidang kemitraan penting. Hilirisasi pengembangan kerajinan kulit adalah pemasaran. Berdasar data di lapangan, umumnya pengrajin mengeluhkan aspek penjualan produknya, terlebih masa pandemi covid-19. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ponorogo tetapi belum dikatakan maksimal. Ini misalnya pembukaan "Batik Reyog Gamelan Gallery" UPTD Sentra Industri Kabupaten Ponorogo dan Bazar pada saat momentum "Grebeg Suro" yang dikomandani Dinas Pariwisata. Yang terakhir sudah dua tahun vakum karena pandemic covid-19. Beberapa bazar dan pameran tingkat Provinsi juga diikuti oleh beberapa pengrajin, seperti penuturan Jaini, pengrajin Nambangrejo. Tetapi ini semua belum meningkatkan secara signifikan. Maka, kemitraan dibutuhkan untuk prospek pemasaran produk mereka.

Beberapa hal yang bisa dilakukan di antaranya adalah: pertama, optimalisasi Galeri UPTD Sentra Industri dengan mengakomodasi produk kerajinan kulit secara lebih masif. Sebagaimana namanya "galeri", display dan

penjualan produk seharusnya menjadi fokus utama dibanding fungsi lain, yakni pelatihan dan bengkel kerja pengrajin. Kenyataannya, para pengrajin memilih kerja di tempatnya masing-masing. Sementara pelatihan sifatnya eksidental dan mestinya peran ini dimainkan oleh Balai Latihan Kerja maupun lembaga Pendidikan formal.

Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo menggandeng Lembaga Perbankan dan Pebisnis untuk mendirikan sentra-sentra kerajinan, display dan penjualan produk di beberapa titik kawasan kerajinan serta tempat wisata. Titik-titik ini menawarkan produk yang mempunyai kekhasan sehingga konsumen lebih mudah mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Untuk kerajinan reog sentra ini terlihat misalnya di pertokoan barat sebelah alun-alun Ponorogo. Untuk kerajinan kulit secara umum sebagaimana Sentra kerajinan kulit Magetan yang terletak di Jalan Sawo Magetan dan Tanggulangin di Sidoarjo.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan advokasi optimalisasi market place. Pelatihan-pelatihan pemasaran online kerajinan kulit perlu semakin digalakkan. Dalam konteks sekarang pelatihan tidak cukup lagi terbatas pada skill kerajinan tetapi juga memasarkan secara online.

Pada FGD misalnya, SMK I Jenangan menyediakan diri untuk berkolaborasi dalam bidang IT untuk kepentingan pemasaran online ini. Hal sama juga direspon positif oleh Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif OPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo. Bidang ini siap berkolaborasi untuk membuat kanal pemasaran bagi industri kerajinan kulit di Ponorogo.

Pada intinya, *resources* dan potensi-potensi kemitraan ini sesungguhnya ada di berbagai pemangku pihak kepentingan. Hanya persoalannya adalah mengkomunikasikan da

menyatukan mereka dalam satu kemitraan yang bisa mendukung eksistensi komunitas dan perkembangan industri kulit di Ponorogo.

Temuan Penelitian

1. Kegiatan Penanaman Padi (on Farm) dan Distribusi Hasil (off Farm)
 - a. Setting Lokasi Penelitian:

Balerejo adalah Kecamatan yang letaknya paling Barat dari Kabupaten Madiun. Garon dan Kebonagung menurut data BPS 2018 adalah dua desa yang surplus padi. tercatat Garon menghasilkan 5.224 ton padi, sementara Kebonagung 5 846 ton padi. Madiun memang memiliki keunggulan menjadi salah satu wilayah dengan lahan pertanian yang sangat luas. Dua desa Garon dan Balerejo menjadi lumbung pangan bagi Kabupaten Madiun. Madiun secara umum menjadi lumbung padi Jawa Timur. Kondisi ini semakin strategis karena Madiun dilintasi jalur provinsi ditambah dengan posisinya yang dekat dengan pintu toll. Hal ini menambah nilai tambah tersendiri dalam meningkatkan produktivitas ekonomi pertanian.

No	Kelurahan / Desa Village Name	Padi Sawah		
		Luas Panen Harvested Area	Produksi Production	Rata-rata Produksi Yields Rate
		(Ha)	(Ton)	(Ton/Ha)
1.	Garon	756	5 224	6,91
2.	Balerejo	746	5 155	6,91
3.	Kebonagung	846	5 846	6,91
4.	Gading	595	4 111	6,91
5.	Jerukgungulung	438	3 026	6,91
6.	Sumberbening	639	4 415	6,91
7.	Bulakrejo	425	2 937	6,91
8.	Tapelan	387	2 674	6,91
9.	Babadan Lor	494	3 414	6,91
10.	Warurejo	399	2 757	6,91
11.	Kedungjati	446	3 082	6,91
12.	Glonggong	527	3 642	6,91
13.	Sogo	725	5 010	6,91
14.	Banaran	384	2 653	6,91
15.	Kedungrejo	477	3 296	6,91
16.	Kuwu	654	4 519	6,91
17.	Pacinan	385	2 660	6,91
18.	Simo	551	3 807	6,91
Jumlah/Total		9 873	68 222	6,91

Luas lahan yang digunakan pada sektor pertanian di Kecamatan Babadan mencakup beberapa macam komoditas tanaman pangan, seperti tanaman padi, jagung dan kedele. Hasil

produksi dari ketiga komoditas tersebut tergolong cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Ponorogo. Adapun data produksi komoditas tanaman pangan yang mencakup tanaman padi, jagung dan kedelai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kelurahan/ Desa	Produksi (ku)			
		Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
1	Kertosari	10.373	2.950	26	245
2	Cekok	15.841	2.056	124	245
3	Patihan wetan	18.426	2.145	134	247
4	Kadipaten	30.466	1.721	335	250
5	Japan	24.330	1.971	293	254
6	Gupolo	12.369	2.868	26	255
7	Polorejo	43.277	4.648	51	259
8	Bareng	12.559	1.557	38	254
9	Ngunt	36.083	3.307	128	262
10	Sukosari	47.887	4.670	149	264
11	Lembah	54.095	358	51	262
12	Pondok	20.732	2.868	138	259
13	Babadan	34.384	4.797	166	257
14	Purwosari	49.805	4.648	166	262
15	Trisono	53.238	760	408	262
Jumlah		463.864	41.321	2.232	3.839

- a. Kegiatan Penanaman (On Farm)

Kegiatan *on farm* pertanian meliputi: persemaian bibit, penanaman, pengairan, pemupukan, dan pemanenan. di Kecamatan Babadan, persemaian bibit dilakukan dengan dua model, yakni model konvensional dan model gulungan. Model konvensional dilakukan dengan menyebar benih padi dipermukaan tanah sawah yang di-*gadang*. Hal ini dilakukan setelah bibit padi direndam duli selama kurang lebih satu malam untuk memicu pertumbuhan tunas. Di antara kelemahan model ini adalah pengawasan ekstra terhadap benih dari serangan hama. Model kedua adalah gulungan. Berbeda dengan model pertama, persemaian model gulungan bisa dilakukan di sekitar rumah dengan media sak/plastik/loyang. Model persemaian ini semakin banyak diterapkan karena dinilai efisien oleh petani.

Sambil menunggu bibit siap tanam, petani biasanya menyiapkan lahan. Penyiapan lahan memanfaatkan mesin bajak (traktor) yang dimiliki secara pribadi atau kelompok tani. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pola

.....
tanam memperhatikan jarak tanam dan jumlah tanaman dalam setiap lubang. Teknik manual yang dimaksud adalah menanam dengan cara petani berbaris sejajar dengan petani yang lain dan menancapkan benih padi di area tanam sesuai dengan jarak yang telah ditentukan. Metode penanaman padi yang sering dipakai di Desa Lembah dan Desa Trisono adalah metode Tegel, Jajar Legowo dengan jarak tanam 27.5-28 cm dan Metode SRI (*System of Rice Intensification*) dengan jarak tanam 25-30 cm. Salah satu tujuan jarak tanam dibuat agak berjauhan agar sinar matahari dapat masuk dan penyerbukan dapat terjadi secara sempurna.

Pengairan sawah pertanian Kecamatan Babadan masih memanfaatkan saluran irigasi dari air Telaga Ngebel, akan tetapi jumlah air yang ada belum mencukupi kebutuhan para petani, air yang dapat dimanfaatkan masih sekitar 30-40% saja dari keseluruhan yang dibutuhkan. Selain keterbatasan air dari telaga Ngebel, beberapa titik saluran irigasi mengalami kerusakan karena endapan tanah dan kebocoran. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan air para petani memaksimalkan pengairan dengan menggunakan sumur-sumur sawah yang dipompa dengan menggunakan *submersible pump* (sibel) dan mesin pompa air *jet pump*. Sedangkan alat yang digunakan untuk menjalankan alat pompa tersebut (*submersible pump* (sibel) dan mesin pompa air *jet pump*) rata-rata petani menggunakan mesin *diesel* secara mandiri.

Konsekuensinya, petani harus menyediakan biaya pengairan. Sesuai fakta lapangan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan ditemukan fakta bahwa para petani yang memiliki mesin pompa air sendiri untuk mengairi satu kotak sawah dengan mesin diesel petani memerlukan waktu sembilan jam, dengan biaya perjamnya 1 liter solar.

sebesar Rp. 5.150, -. Sehingga untuk mengairi satu kotak sawah petani memerlukan

biaya paling tidak sebesar Rp.46.000, - untuk sekali pengairan (sumur dan disel punya sendiri). Belum lagi apabila petani tersebut tidak mempunyai sumur sendiri, maka biaya per 1 jam mencapai Rp15.000, - s/d Rp20.000, - (tergantung keluaran airnya). Apabila dalam kasus ini diasumsikan menggunakan biaya Rp15.000-/jam maka untuk satu kotak lahan sawah membutuhkan biaya Rp135.000, - (untuk satu kali pengairan).

Proses pemupukan tanaman padi di Desa Lembah maupun Desa Trisono Kecamatan Babadan rata-rata tiga kali sampai panen dengan estimasi biaya Rp200.000,- per satu kotak sawah. Waktu pemupukan dilakukan oleh petani di kedua desa sebanyak tiga kali pemupukan, pertama saat padi berumur 7-10 HST, kedua saat tanaman padi berumur 21 HST, dan ketiga pada saat padi berumur 42 HST. Karena di Desa Lembah dan Desa Trisono menggunakan sistem penanaman padi semi organik, hal ini mengakibatkan rasio penggunaan pupuk yang berbahan alami dan kimia pada tanaman padi dengan perbandingan 50:50. Untuk pengadaan pupuk, para petani memperoleh pupuk dari kios ada sebagian dari gapotan. Para petani tidak tergantung pada pupuk bersubsidi karena jumlahnya tidak mencukupi. Maka untuk mencukupi kebutuhan tersebut para petani membeli di Kios. Para petani memperoleh informasi pupuk dan obat penanggulangan hama biasanya langsung dari PPL, seperti lewat konsultasi, dialog dan pengarahan/seminar dari PPL dan pengendali hama dari pegawai POPT.

Untuk penanggulangan hama, petani menggunakan tanaman Refugia untuk mengusir hama dan secara kimia petani menggunakan pestisida. Untuk penanggulangan gulma secara alami petani menggunakan metode *garuk* dan *matun*. Sedangkan untuk secara kimia petani menggunakan herbisida. Sampai saat ini para

petani belum bersedia untuk menerapkan full organik karena untuk hasil maksimal petani harus menunggu waktu relatif lama sekitar tiga sampai empat tahun, artinya para petani lebih suka hasil yang instan.

Para petani di kedua desa merasa bahwa ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang mencukupi kebutuhan pupuk dan dirasa kualitas pupuk bersubsidi kurang jika dibandingkan dengan pupuk nonsubsidi. Hal ini kemudian sebagian besar petani di desa Lembah memiliki penilaian yang kurang baik terhadap kualitas pupuk bersubsidi. Sehingga para petani bersedia membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Harapan para petani adalah ketercukupan pupuk bersubsidi ditambah dan diikuti dengan peningkatan kualitas pupuk bersubsidi. Jika hal ini terpenuhi maka para petani mampu lebih menghemat biaya dan pada akhirnya petani merasa sangat diuntungkan.

Tahap akhir dari penanaman padi adalah tahap panen. Masa panen biasanya dilakukan pada saat padi berumur 120 hari (tergantung varietas padi). Melihat kondisi di lapangan diketahui pola panen di Kecamatan Babadan baik Desa Lembah maupun Desa Trisono menggunakan teknik yang sama yaitu dengan manual dan menggunakan mesin. Teknik manual dilakukan dengan cara sekelompok pemanen padi turun ke sawah untuk memotong padi menggunakan sabit bergerigi dan selanjutnya dirontokkan dengan menggunakan alat pedal thresher. Pedal thresher ini masih digunakan karena dinilai lebih dapat menghemat waktu dan tenaga. Selain pedal thresher biasa juga menggunakan power thresher. Sedangkan teknik modern dilakukan dengan menggunakan teknologi modern seperti Combin dan Dos. Sehingga mesin dapat langsung turun ke sawah dan memotong sekaligus merontokkan bulir-bulir padi.

Terkait dengan hasil panen, pada umumnya para petani akan menjual hasil panen

dalam kondisi basah langsung kepada para bakul (tengkulak) karena model seperti ini dirasa lebih menguntungkan daripada harus disimpan di rumah dan dijual kemudian hari. Karena diasumsikan apabila tidak langsung dijual akan menambah biaya pengeringan sampai penyimpanan belum lagi terjadi penyusutan dan adanya hama ketika di gudang. Hal ini terjadi karena para petani belum memiliki teknologi setelah panen khususnya untuk alat pengeringan dan penggilingan padi. Langkah selanjutnya yang sangat penting untuk meningkatkan keuntungan para petani adalah dengan memberikan akses penjualan padi dan beras setelah panen.

b. Kegiatan Distribusi (*off Farm*)

Petani Desa Lembah dan Trisono pada umumnya menjual langsung padinya di sawah. Mereka hanya menyisakan sedikit untuk keperluan konsumsi rumah tangga mereka. Berdasarkan penuturan Pengurus Gapoktan Trisono, umumnya Petani menyisakan 4 karung gabah (atau kira-kira 2 kwintal) atau mereka maksimal menyisakan $\frac{1}{4}$ dari hasil pertanian.¹ Yang mereka sisihkan untuk konsumsi adalah biasanya padi semi organik. Detail hal ini tentu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kebutuhan konsumsi para petani. Intinya, mereka lebih banyak menjual secara langsung hasil panen padi dan tidak melakukan “tunda jual” untuk peningkatan nilai ekonomi dari hasil panen mereka. Di antara alasan mereka tidak melakukan tunda jual adalah karena beban pengelolaan padi, utamanya penjemuran dan penyimpanan. Sementara teknologi penjemuran dan penyimpanan belum berkembang di tingkat petani. Petani pada saat yang sama harus menyiapkan proses tanam berikutnya.

Selain hal di atas, petani mempunyai keterikatan modal dengan para bakul. Cost produksi pertanian umumnya didapatkan dari pinjaman bakul sehingga ada kewajiban moral petani untuk segera menjual padi dan melunasi

pinjaman ke bakul. Biaya pengelolaan tanaman padi menurut versi petani lebih mudah didapatkan dari para bakul daripada dari KUR perbankan yang menurut mereka tidak sederhana persyaratannya. Sementara Gapoktan dan Bumdes belum secara optimal melayani peminjaman modal untuk petani karenanya minimnya modal dan keterbatasan SDM pengelola.

Menurut versi Petani, Bulog belum bisa berperan dalam menampung hasil panen padi. Berdasar beberapa FGD, syarat mutu padi dari para Petani dinilai tidak memenuhi standar yang ditetapkan Bulog. Misalnya, sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2015 dibedakan antara Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG). Syarat utama GKP sesuai standar Bulog berdasar Inpres adalah kadar maksimal 25% dan hampa/kotoran maksimal 10%. Sementara itu, GKG kadar air maksimal 14% dan hampa/kotoran 3%.² Pada kenyataannya, menurut perspektif Bulog sebagian besar Petani belum mampu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Pada aspek kadar air misalnya, kebanyakan petani melakukan pengeringan gabah secara manual sehingga tingkat keringnya gabah tidak merata. Ini tentu berbeda jika pengeringan dilakukan dengan alat/mesin.³

Sementara menurut perspektif Petani, sosialisasi yang bersifat teknis terkait penyerapan gabah Petani belum bisa dipahami secara baik sehingga akses petani ke Bulog seakan tersendat. Padahal harga yang diberikan Bulog kepada Petani tentu saja terstandarisasi. Berdasar data Bulog, harga padi per Nopember 2019 di tingkat produsen untuk GKP adalah Rp 5052 dan GKG Rp 5600 serta beras medium Rp 8500. Sementara di tingkat pengepul standar GKG Rp 5800 dan beras medium Rp 9500.

2. Faktor Berpengaruh terhadap imbal hasil pada rantai nilai komoditas padi berdasar data lapangan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap imbal hasil petani padi. faktor-faktor tersebut berkaitan dengan proses-proses on farm maupun off farm yang meliputi: permodalan, pengelolaan lahan dan pengairan, penyediaan bibit, pupuk, dan insektisida, serta distribusi dan penjualan. Pada aspek permodalan sebagian petani masih bertumpu pada sistem utang (rente) kepada pihak ketiga (bakul/pengusaha penggilingan padi). pemenuhan modal pengelolaan padi dengan sistem ini dinilai oleh petani bersifat sederhana dan sesuai kebutuhan dibandingkan dengan pengajuan modal kepada pihak perbankan. Teknis dan prosedur pengajuan pembiayaan perbankan (KUR) dinilai bersifat kompleks bagi petani. Bumdes dan Gapoktan pada kenyataannya belum bisa memberikan jasa permodalan yang cukup serta belum bisa melakukan mediasi dengan pihak perbankan.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap rendahnya imbal hasil adalah pengolahan lahan dan pengairan. Umumnya tata kelola pertanian padi di wilayah Madiun dan Ponorogo masih dilakukan dengan sistem tradisional. Beberapa teknologi, semisal traktor untuk pembajakan sawah, sudah dimanfaatkan, tetapi banyak aspek lain yang belum tersentuh teknologi seperti penanaman, penyemprotan, dan penyiangan (teknik garuk dan teknik matun). Pada sisi yang lain, tenaga kerja pertanian (buruh tani) semakin sulit didapatkan. Tata kelola pengairan menjadi problem berikutnya. Air sebagai unsur penting pertanian dirasakan masih belum mencukupi. Sebagian petani bahkan cukup mengandalkan sistem tadah hujan. Sebagian besar mengandalkan pompa air diesel, sebagian pompa air sibel dengan tenaga listrik. Ini tentu membutuhkan

.....

cost yang tidak sedikit. Pengairan dengan sistem irigasi dinilai tidak mencukupi selain problem infrastruktur pengairan yang belum sepenuhnya baik, terutama di wilayah Ponorogo. Terlepas dari problem ini, para petani di lokasi penelitian umumnya memberanikan diri untuk melakukan pola tanam padi-padi-padi dalam satu tahun masa tanam, walaupun pihak penyuluh pertanian sebenarnya menyarankan pola padi-padi-palawija untuk mengembalikan fungsi kesuburan tanah.

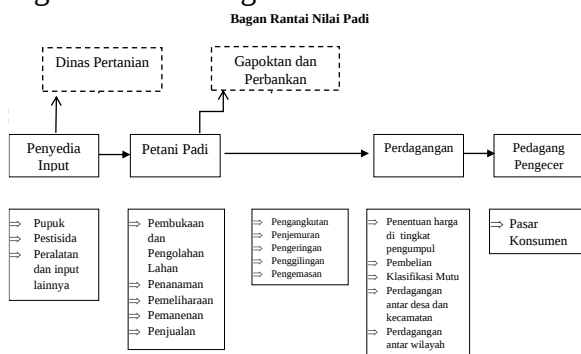
Varietas bibit tanaman padi belum ditanam secara variatif dalam setiap musimnya, terutama bibit yang tidak banyak membutuhkan air dan sesuai dengan kondisi geografis. Setelah bibit ditentukan, penyemaian bibit adalah hal penting yang harus diperhatikan. Para petani melakukan pemupukan dan penyiapan lahan untuk pembibitan yang optimal. Hal ini dilakukan disawah maupun di pekarangan rumah dengan cara tertentu. Model yang terakhir semakin berkembang, selain efisiensi, para petani lebih mudah melakukan kontrol terhadap bibit padi mereka. Setelah bibit mencapai usia layak tanam, bibit padi di tanam di sawah secara manual dengan memanfaatkan tenaga kerja perempuan. Pada aspek pengelolaan selanjutnya, pupuk menjadi kebutuhan pokok petani. Pemerintah dalam hal ini memberikan pupuk bersubsidi yang didistribusi lewat Poktan dan Gapoktan. Tetapi berdasar informasi, pupuk bersubsidi selain terbatas, kualitasnya kurang terstandarisasi sehingga banyak petani justru memilih pupuk non subsidi. Pupuk dan pestisida yang digunakan petani rata-rata masih bersifat kimiawi (bukan organik) atau sebagian mereka menerapkan pola organik-kimiawi untuk hasil padi yang mereka sebut semi sehat. Penanaman padi secara organik membutuhkan cost yang masih dinilai mahal, sementara pasar belum mendukung untuk produk yang demikian. Karena itu umumnya petani menanam padi semi sehat secara terbatas untuk kepentingan konsumsi sendiri.

Distribusi dan Penjualan: Rata-rata masa panen adalah 105 – 110 hari sejak penyemaian bibit (dua minggu ditambah 90 hari/tiga bulan). Rata-rata petani tidak memiliki ALSINTAN (mesin pemanen) sehingga mereka harus menyewa pada pihak lain (bahkan yang datang dari wilayah lain). Tenaga kerja yang terbatas dan keinginan untuk melakukan efisiensi waktu, mereka dituntut untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk memanen padi. Pada umumnya petani menjual secara langsung hasil panennya kecuali untuk persediaan konsumsi dan keperluan sosial (*mbecek*, *slametan* dan yang semisal). Praktek “tunda jual” tidak populer di kalangan petani di wilayah Madiun dan Ponorogo. Ada beberapa alasan mengapa petani menjual secara langsung hasil panennya. Pertama, petani tidak mau disibukkan dengan beban pengelolaan padi (pengeringan dan penyimpanan) sementara mereka harus mempersiapkan proses tanam berikutnya. Teknologi pengelolaan padi pasca panen, utamanya pengering (*dryer*), masih menjadi alat yang mahal bagi Gapoktan sekalipun. Kedua, pengalaman petani mengatakan bahwa tunda jual padi justru sering kali merugikan. Berdasar penuturan mereka kerugian itu bisa diakibatkan oleh turunnya harga padi “kedunan rego” dan penyusutan berat padi serta berbagai resiko hama ketika padi disimpan. Ketiga, petani dituntut untuk segera jual karena kewajiban pelunasan hutang untuk biaya awal pengelolaan. Petani tidak ada pilihan lain kecuali menjual hasil panen padi kepada pihak pemberi hutang dengan selisih tertentu dari harga pasar. Pada kondisi terburuk, bisa terjadi sistem ijon, yakni harga gabah didasarkan pada sistem taksiran dari pemberi hutang.

3. Rantai Nilai Komoditas Padi di Balerejo Madiun dan Babadan Ponorogo

Berdasar data lapangan, mata rantai komoditas padi dari para petani yang menjual produk kepada pedagang (bakul) di tingkat desa, kemudian dari pedagang tingkat desa dijual kepada pedagang pengepul di wilayah

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung, dan terakhir dijual ke pengecer dan konsumen yang ada di pasar Legi Kabupaten Ponorogo dan beberapa pasar di wilayah kecamatan, atau bahkan ke luar daerah. Rantai nilai ini mirip dengan Balerejo Madiun, hanya di Madiun pembeli Gabah petani rata-rata dilakukan oleh pedagang besar atau pengepul. Rantai nilai komoditas pada dapat digambarkan sebagai berikut:



Upaya untuk emningkatkan imbal hasil bagi petani telah dicoba diusahakan oleh Pemerintah lewat dinas dan pemangku kepentingan terkait. Pada rangkaian kegiatan penanaman dan distribusi pemerintah menyediakan paket regulasi dan kebijakan yang lengkap (pola produksi; lahan air, dan lingkungan; inovasi teknologi pertanian, kebijakan harga dan perdagangan padi dan beras). Tetapi dalam praktek di lapangan, berbagai regulasi tidak selalu sesuai dengan yang diidealkan. Pada setiap rangkaian kegiatan rantai nilai pada kenyataannya belum seluruhnya berpihak pada perbaikan imbal hasil petani. Ketersediaan air, pupuk bersubsidi, teknologi pertanian dan distribusi hasil panen masih diliputi problem yang tidak menguntungkan para petani.

Berdasar wawancara dengan beberapa Gapoktan di Balerejo dan Madiun, para petani dipaksa untuk secara mandiri mengupayakan air dengan pompa air listrik atau disesal karena pengairan sawah dengan irigasi yang ada tidak

mencukupi. Selain karena debit air, berdasar penuturan petani, infrastruktur irigasi juga membutuhkan perbaikan. Selain, berakibat pada semakin menipisnya air tanah, pengairan non irigasi ini juga menambah cost produksi pertanian. Selain persoalan pengairan, ketersediaan pupuk bersubsidi juga menjadi persoalan. Pupuk bersubsidi selain terbatas, secara kualitas juga tidak sebanding dengan non-subsidi yang tentu berpengaruh terhadap hasil pertanian padi. Distribusi pupuk bersubsidi inipun tidak ditangani langsung oleh Poktan atau Gapoktan.

Untuk mendukung efesiensi pengelolaan lahan dan hasil pertanian pemerintah sejatinya telah memberikan insentif pengadaan alat dan teknologi pertanian. tetapi bantuan dan insentif belum meng-cover kebutuhan minimal masyarakat petani. Pada beberapa aspek pengolahan lahan pertanian, petani masih mengandalkan sewa alat dari pihak lain (belum bisa dicukupi oleh Gapoktan dan Poktan). Bisa disebut di antaranya adalah tlaktor dan alat pemanen padi. Beberapa kegiatan pertanian bahkan dilakukan secara manual oleh petani, semisal kegiatan *matun* dan panen padi. Selain, faktor efesiensi yang dipertaruhkan, cost produksi semakin meningkat. Pada sisi yang lain tenaga kerja pertanian (buruh tani) semakin sulit untuk didapatkan.

Pada saat panen, petani tidak mempunyai pilihan kecuali menjual secara langsung hasil panennya kepada para pedagang kecil atau besar dengan harga pasar yang fluktuatif. Bulog yang sedianya menyerap gabah petani, pada kenyataannya masih jauh dari harapan petani. Berdasar data lapangan, persoalannya bersifat kompleks. Dari pihak Bulog, syarat rendimen padi petani banyak yang tidak sesuai dengan standar yang dibakukan. Sementara dari perspektif petani, syarat yang dibakukan masih terasa sulit untuk ditembus sementara belum

ada sosialisasi bagaimana bisa menjual komoditas mereka ke Bulog.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kegiatan *on farm* pertanian meliputi: persemaian bibit, penanaman, pengairan, pemupukan, dan pemanenan. di Kecamatan Babadan, persemaian bibit dilakukan dengan dua model, yakni model konvensional dan model gulungan. Model *pertama* konvensional dilakukan dengan menyebar benih padi dipermukaan tanah sawah yang di-*gadang*. Hal ini dilakukan setelah bibit padi direndam duli selama kurang lebih satu malam untuk memicu pertumbuhan tunas. Di antara kelemahan model ini adalah pengawasan ekstra terhadap benih dari serangan hama. Model *kedua* adalah gulungan. Berbeda dengan model pertama, persemaian model gulungan bisa dilakukan di sekitar rumah dengan media sak/plastik/loyang. Model persemaian ini semakin banyak diterapkan karena dinilai efisien oleh petani

Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses *on farm* maupun *off farm* meliputi: permodalan, pengelolaan lahan dan pengairan, penyediaan bibit, pupuk, dan insektisida, serta distribusi dan penjualan. Pada aspek permodalan sebagian petani masih bertumpu pada sistem utang (rente) kepada pihak ketiga (bakul/pengusaha penggilingan padi). pemenuhan modal pengelolaan padi dengan sistem ini dinilai oleh petani bersifat sederhana dan sesuai kebutuhan dibandingkan dengan pengajuan modal kepada pihak perbankan. Teknis dan prosedur pengajuan pembiayaan.

Mata rantai komoditas padi dari para petani yang menjual produk kepada pedagang (bakul) di tingkat desa, kemudian dari pedagang tingkat desa dijual kepada pedagang pengepul di wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung, dan terakhir dijual ke pengecer dan konsumen yang ada di pasar Legi Kabupaten Ponorogo dan beberapa pasar di

wilayah kecamatan, atau bahkan ke luar daerah. Rantai nilai ini mirip dengan Balerejo Madiun, hanya di Madiun pembeli Gabah petani rata-rata dilakukan oleh pedagang besar atau pengepul.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis dan simpulan dari hasil kajian evaluasi yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran dan rekomendasi tindak lanjut bahwa Faktor-faktor yang berkaitan dengan proses *on farm* maupun *off farm* meliputi: permodalan, pengelolaan lahan dan pengairan, penyediaan bibit, pupuk, dan insektisida, serta distribusi dan penjualan. Pada aspek permodalan sebagian petani masih bertumpu pada sistem utang (rente) kepada pihak ketiga (bakul/pengusaha penggilingan padi). pemenuhan modal pengelolaan padi dengan sistem ini dinilai oleh petani bersifat sederhana dan sesuai kebutuhan dibandingkan dengan pengajuan modal kepada pihak perbankan. Teknis dan prosedur pengajuan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, K. A. N. P., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem Melalui Pendekatan Agribisnis. *Jurnal Teknik Pomits*.
- Holik, A., & Bachtiar, R. R. (2019). Prediksi Hasil Panen Padi Menggunakan Awak Kapal. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian Dan Biosistem*.
<https://doi.org/10.29303/jrpb.v7i2.139>
- Nirmala, A., Hanani, N., & Muhaimin, A. (2016). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *HABITAT*.
<https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.8>

- Nisa, N. K. (2015). Motivasi Petani dalam Menanam Komoditas Padi Pada Daerah Lumbung Padi Di Kabupaten Gresik. *Swara Bhumi*.
- Pradiana, Wida, D. (2007). PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PADI SAWAH MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*.
<https://media.neliti.com/media/publications/42437-ID-pengembangan-sistem-inovasi-dalam-perspektif-peningkatan-daya-saing-daerah-denga.pdf>
- Dewi, K. A. N. P., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Komoditas Unggulan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Karangasem Melalui Pendekatan Agribisnis. *Jurnal Teknik Pomits*.
- Holik, A., & Bachtiar, R. R. (2019). Prediksi Hasil Panen Padi Menggunakan Pesawat Tanpa Awak Kapal. *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian Dan Biosistem*.
<https://doi.org/10.29303/jrpb.v7i2.139>
- Nirmala, A., Hanani, N., & Muhaimin, A. (2016). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan di Kabupaten Jombang. *HABITAT*.
<https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.8>
- Nisa, N. K. (2015). Motivasi Petani dalam Menanam Komoditas Padi Pada Daerah Lumbung Padi Di Kabupaten Gresik. *Swara Bhumi*.
- Pradiana, Wida, D. (2007). Pengembangan Agribisnis Sawah Melalui Gapoktan. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*.
- Rianto, R., Putra, E. H., & Harpawi, N. (2017). Sistem Pemantauan Sawah Padi Berbasis Wireless Multimedia Sensor Network (WMSN). *Jurnal Aksara Elementer*.
- Syufa'at, S. (2013). Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'Ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam*, 23(2), 143.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.20>
- Wahyunindyawati. (2009). Pengaruh Faktor-Faktor Produksi Terhadap Keuntungan Usahatani Padi. In *Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur*.
- Wiyono, S., Widodo, ., & Triwidodo, H. (2015). Mengelola Ledakan Hama dan Penyakit Padi Sawah Pada Agroekosistem Yang Fragil dengn Pengendalian Hama Terpadu Biointensif. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: *Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian Dan Lingkungan*.
<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i2.10303>
- Wurjandari, M. S. D., Wiyono, S., Triwidodo, H., Widiarta, I. N., Suharto, H., Sulistyati, M., ... Rakhmadi, F. A. (2014). Sistem Proteksi Tanaman Padi Dari Serangan Hama Wereng Menggunakan Gelombang Ultra-. *Penelitian Pertanian Terapan*.
<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v1i2.10303>